

KONFLIK AS-IRAN: BENTURAN ANTAR PERADABAN?

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Tenggat waktu enam puluh hari yang ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1737 bagi Iran untuk memenuhi tuntutan DK PBB agar Iran menghentikan pengkayaan uranium telah dilampaui pada tanggal 21 Februari 2007. Sejarah menyatakan bahwa ternyata Iran tidak mau tunduk pada resolusi DK PBB itu yang notabene sangat didominasi kepentingan Amerika Serikat (AS).

Iran menyatakan sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya akibat dari ketidakpatuhannya terhadap resolusi DK PBB 1737. Bahkan, beberapa hari sebelum batas akhir pemenuhan resolusi DK PBB 1737 Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan perang besar-besaran di kawasan Teluk Persia. Simulasi perang ini merupakan isyarat kuat bahwa Iran sudah siap bertempur dengan negara manapun, termasuk Amerika Serikat, yang mencoba mengganggu kedaulatan nasionalnya. Fakta ini telah memaksa DK PBB yang dimotori AS untuk bersidang dan mengeluarkan resolusi baru yang akan memperkuat sanksi terhadap Iran, termasuk kemungkinan serangan militer ke Iran.

Namun, pemerintahan Iran di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad tampaknya tidak gentar dengan gerakan-gerakan politik AS tersebut. Bahkan, Mahmoud Ahmadinejad dengan gagah berani menyampaikan pidato di hadapan rakyat Iran bahwa adalah hak Iran untuk menguasai dan memiliki nuklir. Maka itu, Iran menentang setiap bentuk arogansi imperialisme dari Amerika Serikat.

Kaitannya dengan kemungkinan terjadinya peperangan dengan AS, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa secara teknologi militer, Iran mungkin jauh di bawah AS. Namun, para mullah di Iran tidak menyandarkan secara penuh kekuatan militer Iran pada kekuatan teknologi militer semata. Para Mullah di Iran menekankan pada mobilisasi pembangunan *national and character building* bangsa Iran. maka *jihad fii sabilillah* adalah pijakan hakiki bagi setiap insan militan Islam dan militer Iran dalam melawan agresor negara luar. Dengan kata lain, ini menunjukkan karakter musuh yang jauh berbeda dengan musuh-musuh AS sebelumnya.

Lebih lanjut menurut Iran, politik luar negeri *axis of evil* yang dijalankan AS di bawah kepemimpinan George W. Bush memiliki kesamaan dengan politik luar negeri *evil empire* yang dilakukan oleh pendahulunya Ronald Reagan lebih dua dekade yang lalu. Saat itu politik luar negeri seperti itu diberlakukan untuk memperluas dan menjaga stabilitas kekuasaan yang dimiliki oleh peradaban Barat terutama Amerika Serikat.

Dengan kata lain, apabila kita ikuti logika ini berarti Iran sudah memproyeksikan bahwa apabila terjadi peperangan di kawasan Teluk Persia, terdapat kemungkinan “perang suci” akan menjalar di banyak negara-negara Timur Tengah yang memiliki penduduk militan beragama Islam aliran Shiah. Keberadaan para penganut aliran Shiah ini bisa merupakan modalitas dasar revolusi Iran untuk meruntuhkan pengaruh dominan dari Amerika Serikat. Itu berarti juga akan menghancurkan sistem-sistem pembangunan Barat, yang tidak diterima oleh masyarakat luas yang masih memegang nilai-nilai tradisional.

Revolusi Iran tampaknya akan makin keras menggema sebagai salah satu bentuk revolusi sosial yang akan terus menjalar ke berbagai belahan dunia dengan satu tujuan menggugat imperialisme AS. Para simpatisan Iran di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah akan menyerang semua kepentingan-kepentingan AS dan Eropa yang mewakili peradaban Barat.

Pada titik ini, timbul pertanyaan mungkinkah konflik AS-Iran yang terjadi sekarang ini merupakan ejawantah dari benturan antar peradaban?.

Pada tataran makro politik global bisa saja sebenarnya mungkin saat ini sedang terjadi benturan peradaban antara peradaban Barat (*the West*) yang dipimpin AS dengan peradaban non-Barat (*the Rest*) yakni peradaban Islam, Confusius, Hindu, dan Afrika. Secara hipotetik, bisa saja pemicu (*trigger*) makin dominan munculnya “peradaban sebagai sebuah unit analisis dalam politik global” yakni peristiwa penyerangan gedung *World Trade Center* (*WTC*) di kota New York, tanggal 11 September 2001. Beberapa hari setelah peristiwa monumental ini Bush dalam siaran BBC secara reaktif menyatakan “*This crusade, this war on terrorism, is going to take along time. In this war, we will not tire; we will not falter; and we will not fail* (Perang suci ini, perang melawan terorisme akan berlangsung lama. Dalam perang ini kami tidak akan pernah merasa letih, tidak akan pernah melakukan kesalahan, dan tidak akan pernah gagal).” (Bush, BBC, 16 September 2001).

Pernyataan Bush itu ditindaklanjuti melalui pemunculan corak politik luar negeri yang ofensif terhadap *axis of evil* (poros kejahatan) pada awal tahun 2002. Pada hakikatnya kebijakan luar negeri AS ini sarat dengan muatan-muatan peradaban dan kultural yang

menyatakan bahwa terdapat jalinan atau poros yang mencoba membahayakan keberadaan liberalisme dan demokrasi sebagai nilai-nilai kultural yang dominan dalam politik global. Karena itu, kebijakan luar negeri AS sejak itu dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri suatu negara yang disesuaikan dengan identitas kebudayaan yang dimilikinya.

Assumsi ini diperkuat dengan paparan *Douglas J. Feith (Under Secretary of Defense for Policy)* pada tahun 2003 menyampaikan tiga strategi AS dalam Perang Global Melawan Terorisme (*US Strategy in the Global War Against Terrorism*) yaitu: pemecahan dan penghancurkan organisasi teroris dengan menggunakan kekuatan militer ofensif penuh; perang ide (*battle of ideas*); dan pembangunan keamanan domestik. Kita mafhum bahwa target utama wilayah perang global melawan terorisme cenderung merujuk kepada bangsa-bangsa yang mayoritas berpenduduk Muslim dan atau bangsa-bangsa yang didiami minoritas penduduk Muslim.

Itu berarti, dalam kajian strategi besar, sebenarnya negara-negara tersebut adalah *target sangat utama* dalam perang semesta AS melawan terorisme.. Uniknya, dalam strategi AS tersebut diakui bahwa diperlukan implementasi yang lebih dari strategi kedua *battle of ideas* dibandingkan penggelaran kekuatan militer ofensif. Perang ide melawan terorisme lebih halus dilakukan, tetapi hasilnya dapat lebih ampuh daripada pengerahan kekuatan militer. Teknik perang ide ini, misalnya saja “pencucian otak” secara tidak langsung akan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh suatu bangsa. Secara laten dan pæti pada akhirnya bangsa tersebut akan kehilangan roh kebangsaannya (baca: jatidirinya) dan dalam jangka waktu lama akan dapat mengikis habis akar peradabannya sendiri.

Dari keseluruhan paparan di atas dapat dimaknakan bahwa George W. Bush sekarang ini jelas sudah menggunakan berbagai isu tentang peradaban dan kultural sebagai upaya untuk melakukan legitimasi atau pembenaran terhadap berbagai usaha dan tindakan yang diambil oleh negara Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi peradaban Barat dalam politik global. Bush selalu mengutamakan nilai-nilai liberalisme serta demokrasi sebagai nilai-nilai yang mutlak harus diuniversalkan, termasuk ke negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Namun, sebagai reaksi dari pemaksaan kehendak penanaman nilai-nilai Barat di atas telah menghasilkan gerakan anti-Barat dari negara-negara lain dengan berbagai pradabannya, termasuk dari negara-negara yang memiliki peradaban Islam. Misalnya, aksi dan reaksi yang terjadi antara AS dan Iran hanya menghasilkan semakin tajamnya antagonisme yang ada diantara kedua negara. Hal itu dikarenakan kedua pihak terlalu mengeksploitasi perbedaan

peradaban di antara mereka. Yang jelas, menghadapi situasi gawat ini AS dan Iran perlu menahan diri dari retorika dan tindakan-tindakan yang hanya dapat memperkeruh situasi keamanan di kawasan.

Dalam mensikapi pola hubungan dengan negara-negara yang memiliki peradaban yang berbeda, akan bijaksana kiranya apabila perumusan kebijakan luar negeri suatu negara mempertimbangkan secara saksama pentingnya menumbuhkembangkan gagasan dialog antar peradaban (*dialogue among civilizations*). Secara demikian, diharapkan peluang jalur diplomasi dalam penyelesaian pertentangan politik global akan tetap selalu terbuka lebar. Peluang itu dapat tercapai karena pada hakikatnya peradaban mengajarkan pada kita bahwa umat manusia itu cinta damai.***

Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.